

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Labuhan Batu Utara  
2016 – 2020

<sup>1</sup>Fitria, <sup>2</sup>Gabriel Adi Putra Tampubolon, <sup>3</sup>Putri Aulina

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : [fitria220101@gmail.com](mailto:fitria220101@gmail.com), [hsri51258@gmail.com](mailto:hsri51258@gmail.com), [putriaulina39308@gmail.com](mailto:putriaulina39308@gmail.com)

Corresponding Mail Author: [fitria220101@gmail.com](mailto:fitria220101@gmail.com)

---

**Abstract** : This research is to determine the Regional Management Performance of North Labuhan Batu by using the Regional Financial Management performance. This research is a descriptive research through secondary data. Data Analysis by calculating Regional Financial Performance. The results of this study indicate that 1) The performance level of Regional Financial Management in Labura Regency ranges from 44.23% - 72.57%. including the Medium category, 2) The effectiveness ratio ranges from 111.63% - 107.84% in general it is very effective. The implications of this research for institutions (Labuhan Batu Utara District Government) as policy makers are expected to increase local revenue by maximizing the potential that exists in the region.

**Keywords:** *Analysis, Financial Management, Labuhanbatu Utara.*

---

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah (pemda) merupakan laporan terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan serta transaksi-transaksi keuangan dan nonkeuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Keuangan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEUANGAN NEGARA, 2008). Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2004). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah

daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. (Mardiasmo, 2004) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja merupakan sebuah pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang telah direncanakan, maka kinerja dari organisasi dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika pencapaian melebihi dari yang telah direncanakan dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut sangat baik.

Namun, apabila perencanaan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk. Kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelolakeuangan (Darise, 2008). Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2010). Analisis terhadap laporan keuangan dianggap menjadi alat manajerial yang penting untuk evaluasi kekuatan, dan kelemahan suatu perusahaan. Kondisi keuangan adalah konsep yang luas yang menggambarkan kesehatan keuangan pemerintah daerah (Turley, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafni, 2017) menyimpulkan bahwa adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam kategori sangat efektif di tahun 2011 - 2012 dan tidak efektif di tahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien. Bila dilihat dari rasio belanja aktivitas / kecocokan pada periode 2011- 2012, Kabupaten Labuhan Batu masih memprioritaskan pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Selain pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun dan negatif di tahun 2013, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki DSCR di atas 250% setiap tahunnya. Selanjutnya, (Christian D. Sumual, 2017) menyimpulkan bahwa Selama tahun 2013-2016 Kota Tomohon hanya mendapatkan predikat sebagai Kota yang efektif karena banyak target yang telah dicapai, tapi untuk pertumbuhan kemandirian dan efisiensi Kota Tomohon belum memenuhi sesuai standar yang diinginkan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja pemerintah daerah

menggunakan beberapa rasio diantaranya derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan, objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan memilih Kabupaten Tapanuli Tengah, karena Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu pemerintah daerah yang sudah berdiri lama dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi keuangan daerah yang cukup tinggi dan diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

## II. Landasan teori dan metode penelitian

### Landasan Teori

#### Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk. Sedangkan kinerja keuangan adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

#### Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam hubungan pengukuran kinerja, beberapa hal penting perlu mendapat penekanan yaitu mengenai penetapan indikator kinerja, penetapan pencapaian kinerja dan formulir pengukuran kinerja. Menurut Whittaker dalam (Moehariono, 2012), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang di gunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk mmenilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*).

#### Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal

ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan menurut (Kuswandi, 2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan, yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang dapat dinilai secara moneter, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang erat kaitannya dengan kewajiban dan hak daerah.

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD.

Sementara, pihak pengelola keuangan daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pengelolaan keuangan daerah haruslah terlaksana secara transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## Metodologi Penelitian

### Data Dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan apa adanya.

Penelitian berjalan apa adanya. Sumber data dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data di kantor bupati Labuhanbatu Utara dan faktor-faktor pendukung lainnya, baik berupa dokumen dan secara wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data yang akan dikumpulkan penulis adalah:

1. Data primer menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016) ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. pengumpul data primer yaitu pengumpulan data yang di peroleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data primer yang diperoleh yaitu melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

2. Data sekunder menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016) ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang di peroleh yaitu berupa data laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten labuhan batu utara tahun 2018-2020.

### Subjek dan Objek Penelitian

#### Subjek Penelitian

Subjek Penelitian menurut (Arikunto, 2016) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

#### Objek Penelitian

(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016) menyatakan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang di tetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2018-2020.

#### Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), 2015) mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan Pendapatan Transfer ataupun Bantuan Pusat & Pinjaman (BPP). Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
2016	42.296.115.862	956.260.419.829,00	44,23	Rendah
2017	34.449.898.608,00	812.068.185.240,00	42,42	Rendah
2018	57.010.690.545,81	906.591.141.658,00	62,85	Sedang
2019	70.122.562.532,08	874.067.517.898,00	80,22	Tinggi
2020	55.920.283.256,00	770.468.802.360	72,57	Sedang

Sumber : Data diolah tahun 2022

Tabel 1 diatas merupakan hasil perhitungan,yang dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian (2016)} = \frac{42.296.115.862}{956.260.419.829} \times 100\% =$$

Jadi tingkat kemandirian pendapatan transfer tahun 2016 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan

2. Pada tahun 2017 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian (2017)} = \frac{34.449.898.608,00}{812.068.185.240} \times 100\% =$$

Jadi tingkat kemandirian pendapatan transfer tahun 2017 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan

3. Pada tahun 2018 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian (2018)} = \frac{57.010.690.545,81}{906.591.141.658} \times 100\% =$$

Jadi tingkat kemandirian pendapatan transfer tahun 2018 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan

4. Pada tahun 2019 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian (2019)} = \frac{70.122.562.532,08}{874.067.517.898} \times 100\% =$$

Jadi tingkat kemandirian pendapatan transfer tahun 2019 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan

5. Pada tahun 2020 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian (2020)} = \frac{55.920.283.256,00}{770.468.802.360} \times 100\% =$$

Jadi tingkat kemandirian pendapatan transfer tahun 2020 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan.

Dari tabel 1 diatas, terlihat bahwa realisasi pendapatan transfer tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 956.260.419.829 dengan persentasenya 44,23 % dan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 812.068.185.240,00 dengan persentasenya 42,42% selain itu tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 906.591.141.658,00 dengan persentasenya 62,85 % dan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 874.067.517.898,00 dengan persentasenya 80,22 % selain itu tahun 2020 sebesar Rp. 770.468.802.360,00 dengan presentasenya 72,57%. Dilihat dari persentase kemandirian tersebut termasuk kedalam kategori “Sedang”.

Dari hasil tersebut di atas membuktikan bahwa pemerintahan kab.Labuhanbatu Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah mengoptimalkan dan mengimplementasi potensi dan sumber daya yang dimiliki.. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penerimaan pendapatan transfer yang tinggi.

#### Rasio Efeftivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan estimasi target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. Rasio Efeftivitas

Tahun	PAD	Target (Rp)	Rasio Efeftivitas (%)	Keterangan
2016	42.296.115.862,00	36.838.932.858,00	114,81%	Sangat Efektif
2017	34.449.898.608,00	33.811.787.934,00	101,88%	Sangat Efektif
2018	57.010.690.545,81	51.069.120.952,00	111,63%	Sangat Efektif
2019	70.122.562.532,08	62.805.708.468,00	111,65%	Sangat Efektif
2020	55.920.283.256,00	55.494.095.702,32	99,24%	Efektif

Sumber : Data diolah tahun 2022

Tabel 2 diatas merupakan hasil perhitungan,yang dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas (2016)} = \frac{42.296.115.862}{36.838.932.858,00} \times 100\% = 114,81\%$$

Jadi tingkat efektivitas pendapatan transfer tahun 2016 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan sangat efektif.

2. Pada tahun 2017 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas (2017)} = \frac{34.449.898.608,00}{33.811.787.934,00} \times 100\% = 101,88\%$$

Jadi tingkat efektivitas pendapatan transfer tahun 2017 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan sangat efektif.

3. Pada tahun 2018 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas (2018)} = \frac{57.010.690.545,81}{51.069.120.952,00} \times 100\% = 111,63\%$$

Jadi tingkat efektivitas pendapatan transfer tahun 2018 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan sangat efektif.

4. Pada tahun 2019 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas (2019)} = \frac{70.122.562.532,08}{62.805.708.468,00} \times 100\% = 111,65\%$$

Jadi tingkat efektivitas pendapatan transfer tahun 2019 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan sangat efektif.

5. Pada tahun 2020 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas (2020)} = \frac{55.920.283.256,00}{55.494.095.702,32} \times 100\% = 99,24\%$$

Jadi tingkat efektivitas pendapatan transfer tahun 2020 Kabupaten Labuhan Batu Utara dikategorikan efektif.

Dari tabel 2 diatas, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 42.296.115.862,00 dengan persentase efektivitasnya 114,81%, pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 34.449.898.608,00 dengan persentase efektivitasnya 101,88% , pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 57.010.690.545,81 dengan persentase efektivitasnya 111,63 % , pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 70.122.562.532,08 dengan persentase efektivitasnya 111,65 % selain itu tahun 2020 sebesar Rp. 55.920.283.256,00 dengan presentase efektivitasnya 99,24%. Dilihat dari persentase efektivitas tersebut “sangat efektif”.

Dari hasil tersebut di atas membuktikan bahwa pemerintahan kab.Labuhanbatu Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah mengoptimalkan dan mengimplementasi potensi dan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat efektif.

### **Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat. Hasil perhitungan pada tabel 1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Labuhanbatu Uatra pada tahun 2017 - 2019 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2016 kemampuan (*ability*) kemandirian keuangan daerah sebesar 44,23%. Pada

tahun 2017 kemampuan kemandirian keuangan daerah sebesar 42,42% persen dikategorikan rendah dan ini angka paling rendah dari antara tahun yang di analisis selama periode tahun 2018-2020. Pada tahun 2018, 2019, 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diikuti dengan dana perimbangan yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sehingga hasil rasio kemandirian menjadi 88,22 persen dikategorikan tinggi. Pada tahun 2020 mengalami yang tidak terlalu signifikan penurunan tersebut terjadi pada retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetapi diikuti dengan dana perimbangan yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sehingga hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah menjadi 72,57% dikategorikan sedang.

Selain itu dapat diartikan bahwa ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, seperti dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

#### **Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Rasio efektivitas keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2016 sebesar 111,63 persen merupakan kriteria sangat efektif. Kemudian mengalami penurunan pada lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2020 sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 99,24 persen dikategorikan efektif menurut kriteria pengukuran karena berada pada tingkat rasio di bawah 100 persen.

Kemudian dilihat dari pencapaian target pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016,2017,2018, 2019, dan 2020 sudah mencapai target. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara cenderung mengalami naik .Secara rata-rata tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 efektivitas keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 107,84 persen yang berada pada kategori sangat efektif yang berarti kemampuan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan tugasnya termasuk sangat baik. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah berupa yang menerapkan potensi yang sebenarnya tetapi masih banyak kendala sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan seperti dalam hal pemungutan pajaknya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang, sarana prasarana yang belum maksimal, dan tingkat kesadaran dari wajib pajak masih sangat kurang, sehingga kurang maksimalnya sanksi bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009.

#### IV. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemandiria keuangan daerah dalam memenuhi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dikatakan sudah mampu. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Pemkab dalam memenuhi anggaran pemerintah melalui PAD.
2. Efektivitas keuangan daerah dalam memenuhi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dikatakan sudah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah efektif mengatur keuangannya sendiri dengan mengelola penerimaan pendapatan melalui PAD.

#### V. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christian D. Sumual, L. K. (2017). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 9.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Hafni, P. K. (2017). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU TAHUN ANGGARAN 2011–2013. Medan.
- Keuangan, B. P. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEUANGAN NEGARA. Indonesia.
- Keuangan, B. P. (2010). STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.
- Turley, G. R. (2015). *A Framework to Measure The Financial Performance of Local Governments*. Local Government.
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/787/2/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/787/2/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>